

**LARANGAN *TAUKIL WAKIL* WALI NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON**

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LARANGAN *TAUKIL WAKIL* WALI NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON**

Tesis

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**ABDUL BADRI
NIM : 14146410010**

Telah disetujui pada tanggal, 17 April 2017



Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag.
NIP. 19590321 198303 1 002

Pembimbing II,

Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL BADRI**

NIM : 14146410010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Menyatakan bahwa tesis ini, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai dengan kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 17 April 2017

Yang Menyatakan



ABDUL BADRI
NIM : 14146410010

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag.
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 5 (lima) Lembar
Perihal : **Penyerahan Tesis**

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Abdul Badri yang berjudul "*Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*" telah dapat untuk diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 17 April 2017
Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag.
NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Wasman, M.Ag.
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 5 (lima) Lembar
Perihal : **Penyerahan Tesis**

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di

CIREBON

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Abdul Badri yang berjudul “*Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*” telah dapat untuk diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 17 April 2017
Pembimbing II,



Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**LARANGAN TAUKIL WAKIL WALI NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON**

Disusun oleh :

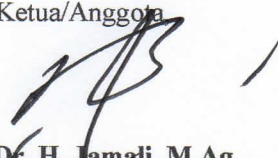
ABDUL BADRI
NIM : 14146410010

Telah diujikan pada tanggal 16 Juni 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Cirebon, 16 Juni 2017

Dewan Penguji

Ketua/Anggota


Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
NIP. 19680408 199403 1 003

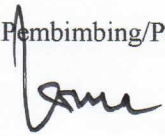
Sekretaris/Anggota,


Dr. Amin Basir, M.A.
NIP. 19690715 200701 1 013

Pembimbing/Penguji,


Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag.
NIP. 19590321 198303 1 002

Pembimbing/Penguji,


Dr. H. Wasman, M.Ag.
NIP. 19590107 199201 1 001

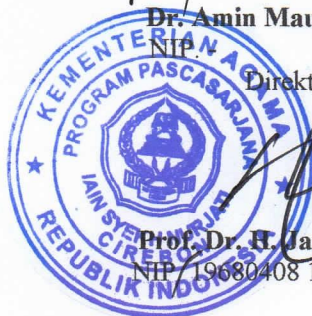
Penguji Utama,


Dr. Amin Maulana, M.A.

NIP.

Direktur,


Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
NIP. 19680408 199403 1 003



ABSTRAK

ABDUL BADRI, *Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas dan fungsi di antaranya melakukan pelayanan, pengawasan dan pencatatan pernikahan yang terjadi di wilayahnya. Pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum yaitu pernikahan yang terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Penghulu. Rukun nikah meliputi: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Di Kecamatan Pangenan, wali dalam melakukan ijab qobul anak atau saudara perempuan yang berada di bawah perwaliannya, mewakilkan kepada PPN/Penghulu atau orang yang dikehendaknya. Wali mewakilkan kepada orang yang dikehendaknya (*wakil*) merupakan kewenangan yang diberikan oleh syar'i secara bebas. Akibat kewenangan yang sangat bebas tersebut terjadi wali mewakilkan kepada orang yang dikehendaknya (*wakil*) dan *wakil* mewakilkan kembali amanat yang diterimannya itu kepada pihak lain (dalam penelitian ini disebut *taukil wakil wali nikah*). Melihat kasus taukil wakil wali nikah ini, KUA Kecamatan Pangenan menolak dan melarang masyarakat untuk melakukannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan alasan masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melakukan taukil wakil wali nikah, alasan larangan atau penolakan KUA Kecamatan Pangenan Kabupten Cirebon terhadap taukil wakil wali nikah dan untuk mengetahui kedudukan dan implikasi yuridis taukil wakil wali nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis induktif yang menggunakan metode pendekatan kepustakaan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yang digunakan diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi peneliti. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli dan akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis, kemudian teknik analisa data dituangkan dalam uraian logis dan sistematis.

Kesimpulan penelitian ini terungkapnya alasan masyarakat Kecamatan Pangenan melakukan taukil wakil wali nikah yaitu karena faktor ketidakmampuan masyarakat melakukan ijab dan faktor kebiasaan masyarakat selalu mewakilkan ijab qobul dalam pernikahan. Alasan KUA Kecamatan Pangenan menolak dan melarang taukil wakil wali nikah yaitu karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di KUA, KUA sebagai pengambil kebijakan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi dalam taukil wakil wali nikah dan KHI, KMA dan PMA tidak mengatur Taukil wakil wali nikah. Taukil wakil wali nikah tidak tercantum secara eksplisit dalam peraturan yang menjadi dasar pernikahan di KUA dan implikasi yuridisnya yaitu apabila belum terjadi ijab, maka dikembalikan kepada wali asli (*Muwakkil*) dan apabila telah terjadi ijab qobul maka harus ada pengulangan ijab qobul (*tajdīdu al-nikâh*).

ABSTRACT

ABDUL BADRI, *Prohibition on Giving Authority from (Custodian) Authorized Representative to (Next Custodian) Another Representative in Religion Affairs Office (KUA) Subdistrict Pangenan, Cirebon Regency*

Religion Affairs Office (KUA) subdistrict Pangenan, Cirebon regency has tasks and functions such as the service, monitoring and record keeping marriage in their territory. Marriage which has force of law is that marriage which the prerequisite and pillars of the marriage are met and the marriage occurs in front of the marriage chief (The Official of Marriage Jotter/PPN). The pillars of marriage are: The candidate of bride groom, The candidate of bride, Wali (The custodian), two witnesses and the consent (the agreement). In subdistrict Pangenan, the custodian in applying the consent his daughter or his sister whom under his authority, represent his authority to marriage chief or PPN or the one who is intended to. The custodian represent his authority to the one who is intended to (a representative) constitutes authority which is given by Islam freely. The consequence of the free authority occurred that the custodian mandates it to a representative (*wakil*) and *the representatative* remandates to another one (in this research called *taukil wakil wali nikah*). Seeing this case, KUA subdistrict Pangenan prevents dan forbids the people to do so.

The objective of the research is to reveal the people excuses in doing or applying *taukil wakil wali nikah*, to reveal the KUA excuses why they forbid the practice *taukil wakil wali nikah* and to know juridical position and implication of *taukil wakil wali nikah*.

The research is a study case research with inductive analysis by applying juridical and normative literature approach method, that is by studying in depth fiqh and ushul fiqh scribes and corpus, and rules and laws which are related to the case discussed. The source of primer data which is gained and used is from library and personal literature collection. The data collection technique is by studying in depth the literature, documents, rules and laws and the experts' opinions and thoughts. The collected data will be used as the thought basis theoretically, and then the data technique is written in logical and systematic essay.

In the research conclusion reveals why the subdistrict Pangenan people's excuses apply *taukil wakil wali nikah* are the disability factor in doing *ijab* (offer) and the custom factor of the people always mandate the consent (the agreement) in a marriage. KUA subdistrict Pangenan excuse in preventing and forbidding *taukil wakil wali nikah* is because it is inappropriate for Standard Operating Procedure (SOP) in KUA, KUA is as the policy maker in the difference of opinion about *taukil wakil wali nikah* and KHI, KMA and PMA do not regulate *Taukil wakil wali nikah*. *Taukil wakil wali nikah* is not written explicitly in rules as the base of marriage in KUA and the juridical implication is that if the consent (the agreement/*Ijab qobul*) has not occurred yet, the authority belongs to the real Wali (*Muwakkil*) and if the consent has occurred, it is needed to repeat the consent (*tajdîdu al-nikâh*).

الملخص

عبد البدر، النحر يم ني نوكل وكيل ولي الزكاح ني مكنتب الشؤون الدينية (KUA)

في الحاي نانجيزان بالمنطقة شربون

مكنتب الشؤون الدينية في الحاي نانجيزان بالمنطقة شربون لديه واجبات و وظائف ومن تلك الواجبات و الوظائف الخدمة في إجراء عقد الزكاح و مراقبته و تسجيله في واليته. الزكاح الصحيح الذي له قوة في الحكم هو الزكاح الذي يخلق فيه الشروط والأركان ، ويكون أمام موظف تسجيل الزكاح (PPN) أو الزائب. و أركان الزكاح هي زوج و زوجة و ولي وشاهدان وإيجاب و في الحاي قبول.

نانجيزان، الولي في تزويج بنه أو أخيه التي تحت واليته يوكل للموظف (PPN) أو شخص آخر الذي يريده. نالشرعية الإسلامية قد أعطت حرية للوالي ني نوكل عقد زكاح بنه أو من في واليته لشخص الذي يريده . و من تلك الحرية يكون الولي يوكل للوكيل، وأتت إلى نوكل الوكيل لغيره أيضا. (في هذا البحث يسمى بنوكيل وكيل ولي الزكاح). نظرا إلى هذه المسألة نمكنتب الشؤون الدينية في الحاي نانجيزان بالمنطقة شربون منع و أحرم الناس في العمل به.

نالهدف من هذا البحث هو الكشف من أسباب المجتمع في الحاي نانجيزان بالمنطقة شربون الذين يؤومون بنوكيل وكيل ولي الزكاح، وأسباب مكنتب الشؤون الدينية في الحاي نانجيزان بالمنطقة شربون في منعه و نحر يمه، و كذلك لمعرفة الموظف والأثار القانونية من نوكل وكيل ولي الزكاح.

و هذا البحث هو الدراسة التحليلية مع النظريات الإستقرائية باستخدام طريقة المنهج المكنتبي القانوني المعيارى، ويكون بمراجعة كتب الفقه و أصوله و النظريات القانونية والوضاى التي تتعلق بمسألة هذا البحث. والمصادر الأساسية لهذا البحث هي المكنتبة و بعض الكتب للباحث نفسه. وطريقة جمع البيانات بدراسة الكتب و النسخيالت عن هذا الموضوع والوثائق والأوزان المرسومة و آراء العلماء نيه التي ستستخدم كالأساس في التنكيير النظري، ثم طريقة تحليل البيانات بتسجيلها في الشرح المنطقي والمنهجي.

وخالصة هذا البحث هو انكشف أسباب المجتمع في الحاي نانجيزان الذين يؤومون بنوكيل وكيل ولي الزكاح و هي عدم استطاع المجتمع في القيام بالإيجاب و عادة المجتمع بنوكيل الإيجاب والقبول في الزكاح. و أما أسباب مكنتب الشؤون الدينية في الحاي نانجيزان بمنعه و نحر يمه هي عدم المطابق بمعايير عملية الإجراء (SOP) في (KUA) و (KUA) باسم الحاكم على إختالف النظر في مسألة نوكل وكيل ولي الزكاح و (KHI) و (KMA) و (PMA) ال يحدد حكم نوكل وكيل ولي الزكاح. نوكل وكيل ولي الزكاح ال يكنتب صريحا في الأوزان لتكون أساس الزكاح في (KUA) والأثار القانونية هو إذا لم يجر الإيجاب نيرد إلى الولي الأصلي (الموكل) و إذا جرى الإيجاب والقبول نتجب إعادة الإيجاب والقبول (تجديد الزكاح).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* kehadiran *Ilahi Rabbi*, berkat *rahmat, hidayah*, dan *Ridla-Nyalah*, saya diberikan kemampuan mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “*Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*” sebagai tugas akhir perkuliahan S2 di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada *Nabiyuna* Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya yang telah memberikan cara pandang hidup yang mampu merubah dunia, mengantarkan kehidupan di dunia ke masa yang beradab sehingga kehidupan ini penuh maslahat dan manfaat.

Penulisan tesis ini ternyata tidak mudah, penuh kendala dan kesulitan yang dihadapi terutama yang bersumber dari pribadi penulis. Namun berkat dorongan dan do'a dari semua pihak, penulisan tesis ini sampai kepada titik yang diharapkan walau jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Sangat disadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan butuh perbaikan secara akademis dan teknis, walaupun telah maksimal dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis tetap mengharapkan saran dan masukan yang membangun agar tulisan ini jauh dari kesesatan pengetahuan.

Tesis ini mengungkapkan tentang taukil wakil wali nikah di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Taukil wakil wali nikah ini merupakan peristiwa pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh wakil sebagai orang yang menerima amanat kepada pihak lain agar menjalankan amanat yang telah diterimanya. Kasus ini terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pangenan karena faktor ketidak mampuan masyarakat Kecamatan Pangenan dalam melakukan ijab pernikahan dan kebiasaan masyarakat melakukan taukil ketika ijab dalam pernikahan. Taukil wakil wali nikah ini ditolak dan dilarang oleh KUA Kecamatan Pangenan sebagai kantor yang mempunyai tugas mengawasi dan mencatat pernikahan.

Penulis sangat bersyukur kepada-NYA karena tugas akhir ini yaitu penulisan tesis selesai sesuai harapan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam pemberian motivasi berupa arahan, bimbingan, dan dorongan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag., Direktur PPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon beserta Dosen dan Staf Tata Usaha atas segala perhatian, pelayanan dan kebijakan dalam perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag., Dosen pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Wasman, M.Ag., Dosen pembimbing II dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Muntaram, S.Ag., dan Bapak Drs. H. Da'in, Kepala KUA Kecamatan Pangenan beserta rekan-rekan Aparatur Sipil Negara KUA Kecamatan Pangenan.
6. Semua informan yang terlibat dalam penulisan tesis ini, terutama masyarakat yang melakukan taukil wakil wali nikah, P3n se Kecamatan Pangenan.

Dan rasa terima kasih yang tak terhingga, do'anya yang selalu saya harapkan, kerdilaanya yang selalu saya dahulukan:

1. Orang tuaku tercinta Mama Warli dan Mimih Kayimah beserta saudara-saudaraku.
2. Isteriku Nok Desay Oktavianty, S.Pd.I, Anak-anakku: Khulashoh (Nok ayoh), Fadlur Rohman (aa fadel), Mohammad 'Alauddin Lubbawi (aa Lubbi) dan Afthon Abyan Nandana (de afthon)
3. Mimih mertuaku mimih IIn dan saudara-saudara iparku.

Akhirnya dengan segudang harapan dan segala kerendahan hati, saya berharap mudah-mudahan segala apa yang dilakukan mendapat *ridla*-Nya dan berkaitan dengan kesalahan dapat *maghfirah*-Nya. dan semoga perkuliahan saya, yang diakhiri penulisan tesis ini bermanfaat dan mendatangkan masalah. *Amin Ya Robbal'alamin.*

Walhamdulillahillobbabil'alamin

Cirebon, April 2017

Penulis



Abdul Badri

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI	-	-

Catatan:

1. â = a panjang
2. Î = i panjang
3. û = u panjang
4. Kata sandang alif + lam (ال) baik diikuti oleh huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah* ditulis *al*. Contoh: النمل ditulis *al-fil*. dan الشمس ditulis *al-syams* bukan *asy-syams*.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah, Shalat dan zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* dituli rangkap, contoh: رَبَّانَا ditulis *rabbânâ*.
7. *Ta marbûthah* diakhir kata: Bila dimatikan ditulis h, seperti محكمة ditulis *mahkamah*, kecuali sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh: روضة الأطفال ditulis *raudat al-atfâl*.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
المخلص	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian pustaka	11
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II TAUKIL WAKIL WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Wali dalam Pernikahan.....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	27
2. Macam-Macam dan Syarat Wali Nikah.....	31
3. Kedudukan Wali Nikah.....	47
B. Taukil Wali dalam Pernikahan.....	57
1. Pengertian dan Dasar Taukil Wali Nikah.....	57
2. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab Taukil Wali Nikah.....	64
3. Lafadz Akad Nikah.....	68
C. Taukil Wakil Wali dalam Pernikahan.....	69
1. Pengertian Taukil Wakil Wali Nikah.....	69
2. Pandangan Para Ulama tentang Taukil Wakil Wali Nikah.....	72
BAB III DESKRIPSI UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON	
A. Keadaan Wilayah.....	77
B. Keadaan Masyarakat dan Umat Beragama.....	78
C. Visi dan Misi.....	81
D. Uraian Tugas Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).....	83
E. Proses Pelayanan Nikah dan Rujuk.....	97
F. Hambatan dan Pemecahan Masalah.....	106

BAB IV TAUKIL WAKIL WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN
CIREBON

A. Alasan Masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon	
Melakukan Taukil Wakil Wali Nikah.....	109
1. Kasus Taukil Wakil wali Nikah di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.....	109
2. Alasan Masyarakat Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melakukan Taukil Wakil Wali Nikah.....	117
B. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melarang atau Menolak Taukil Wakil Wali Nikah.....	163
1. Proses Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.....	163
2. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Melarang atau Menolak Taukil Wakil Wali Nikah.....	172
C. Kedudukan dan Implikasi Yuridis Taukil Wakil Wali Nikah.....	181
1. Kedudukan Tauki Wakil Wali Nikah.....	181
2. Implikasi Yuridis Taukil Wakil Wali Nikah.....	187

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 190

B. Rekomendasi Ilmiah..... 191

DAFTAR PUSTAKA 201

LAMPIRAN-LAMPIRAN 205



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1, Penduduk dan Pemeluk Agama	79
Tabel 2, Tempat Ibadah Umat Beragama	80
Tabel 3, Peristiwa Nikah dan Rujuk Per Desa.....	87
Tabel 4, Peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Tahun 2016.....	89
Tabel 5, Rekapitulasi Peristiwa Nikah Seluruhnya Per Desa.....	89
Tabel 6, Rekapitulasi Usia Perawan yang Melsngsungkan Pernikahan Per Desa.....	91
Tabel 7, Rekapitulasi Status Persitiwa Nikah Per Desa.....	91
Tabel 8, Status Perempuan Perawan dan Janda Menurut Data Desa.....	92
Tabel 9, Tanah Wakaf	95
Tabel 10, Hewan Qurban	96



